



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2021-2022
SELASA, 17 MEI 2022**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Yang kami hormati:

- Para Wakil Ketua DPR;
- Para Anggota DPR;
- Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021–2022.

Pada kesempatan ini, atas nama Pimpinan DPR RI, Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing.

Kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh Anggota DPR RI dan hadirin. Mohon maaf lahir dan bathin. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Menjadi kebahagiaan kita semua, dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga, sanak saudara, dan masyarakat di daerahnya masing-masing, setelah 2 tahun ini Idul Fitri dirayakan secara terbatas.

Pencapaian yang kondusif ini, tidak terlepas dari kerja bersama kita, gotong royong, dalam menangani Pandemi Covid-19. Kerja bersama, gotong royong, yang telah kita lakukan memberikan dampak positif yang memperlihatkan kasus Covid-19 yang terus mengalami tren penurunan, vaksinasi yang terus meningkat, dan kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat mulai kembali pulih secara bertahap.

Inilah kekuatan nasional kita, kebersamaan seluruh anak bangsa dan komponen bangsa, yang dipersatukan dalam semangat gotong royong menghadapi Pandemi Covid-19.

Masa Persidangan V, akan berisikan sejumlah agenda strategis, yaitu antara lain penuntasan pembahasan sejumlah RUU pada pembicaraan tingkat pertama, pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN Tahun Anggaran 2023, antisipasi kebijakan dan ketahanan fiskal pada tahun 2022 untuk merespon

perkembangan perekonomian global yang membebani keuangan negara, serta persiapan tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai pada tahun 2022 ini.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada Masa Persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menuntaskan pembahasan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I.

Pembentukan Undang Undang, yang diselenggarakan oleh DPR RI dan Pemerintah, saat ini difokuskan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam pembentukan Undang Undang melalui berbagai pembahasan, semakin dituntut adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pandangannya.

DPR RI berkomitmen agar dapat menghasilkan produk Undang Undang yang selaras dengan UUD NRI 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat, mengutamakan kepentingan nasional, dan juga membuka ruang partisipasi rakyat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah.

Dengan perkembangan situasi Pandemi Covid-19 saat ini dan penanganan dampak yang semakin kondusif, pada tahun 2023 diharapkan pemulihan sosial dan ekonomi sudah akan semakin baik, serta ancaman Pandemi Covid-19 telah berkurang, walaupun tetap perlu diantisipasi.

Tahun Anggaran 2023, merupakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, dimana batas defisit kembali menjadi maksimum 3% dari PDB.

Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menanganai dampak Pandemi Covid-19, yaitu tekanan penerimaan yang turun tajam akibat terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi nasional dan global, serta untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.

DPR RI dan Pemerintah, harus terus mewaspadaai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian, antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran masih belum kembali ke level sebelum pandemi serta terjadinya *learning loss* di kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya.

Selain itu, dari sisi global, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri. Bahkan APBN Tahun Anggaran 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang terkait dengan minyak bumi.

Dengan kondisi yang demikian, maka kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat, memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan, memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.

DPR RI akan memberikan perhatian pada KEM PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Negara harus hadir dalam mempermudah kehidupan rakyat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera .

Sidang Dewan yang Terhormat,

APBN Tahun Anggaran 2022, saat ini juga mengalami tekanan dari Perkembangan perekonomian global yang meningkatkan harga komoditas global yang turut berdampak pada beban keuangan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2022, khususnya yang terkait dengan minyak bumi.

Oleh karena itu, diperlukan antisipasi kebijakan dan ketahanan fiskal pada tahun 2022 untuk merespon perkembangan perekonomian global yang dapat membebani keuangan negara. Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terkait agar bersama Pemerintah untuk segera

mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat menjaga kemampuan keuangan negara dalam menjalankan APBN 2022.

Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan.

DPR RI akan memprioritaskan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat, antara lain:

1. Permasalahan Penyakit Hepatitis Akut yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya dan menyerang anak dengan rentang usia 1-17 tahun;
2. Permasalahan Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak;

3. Aturan pelanggaran aktivitas dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Bali;
4. Ketentuan penerapan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
5. Langkah-langkah Pemerintah dalam menghadapi kenaikan kasus Covid-19 setelah masa mudik lebaran;
6. Insiden kerusakan di Expo Waena, Kota Jayapura;
7. Capaian Program Vaksinasi dan Booster Covid-19;
8. Pembahasan Tahapan, Program dan Jadwal, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan mengarahkan perhatiannya untuk dapat meningkatkan

kinerja Pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat kemajuan pembangunan.

DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pihak, yang telah bekerja dengan dedikasi yang tinggi agar perjalanan mudik merayakan idul fitri pada tahun ini dapat berjalan dengan baik.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, pada masa persidangan ini DPR RI mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik bilateral, regional, maupun internasional, antara lain:

1. Pertemuan *GOPAC Executive Committee* di Doha, Qatar pada 25-26 Mei 2022
2. Sidang *The 13th AIPA Caucus* akan diselenggarakan pada 7 Juni 2022;

3. Pertemuan ke-4 *Asia-Europe Political Forum (AEPF)* di Praha, Republik Ceko pada 10-12 Juni 2022. ;
4. Sidang *The Eight IPU Global Conference of Young Parliamentarians* di Mesir pada 15-26 Juni 2022;
5. Sidang *Parliamentary Forum at the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development* di New York pada 10-14 Juli 2022.

Melalui tugas diplomasi ini, DPR RI ikut memiliki tanggung jawab dalam membangun dunia yang lebih baik, membangun tatanan sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanir-rahim*, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini Saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa

Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2021–2022 akan dimulai sejak hari ini, Selasa, 17 Mei 2022 sampai dengan 7 Juli 2022.

Kepada Anggota Dewan yang Terhormat, Kami menyampaikan “SELAMAT BEKERJA MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya kepada Kita semua.

Terima kasih.

***Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Om shanti, shanti, shanti Om***

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI**

LAMPIRAN:

➤ Pembahasan Rancangan Undang Undang Tingkat I, diantaranya:

1. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;
2. RUU tentang Aparatur Sipil Negara;
3. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
4. RUU tentang Praktik Psikologi;
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
6. RUU tentang Landas Kontinen.

➤ RUU penyesuaian terkait dengan provinsi yaitu:

1. RUU penyesuaian terkait dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. RUU penyesuaian terkait dengan Provinsi Riau;
3. RUU penyesuaian terkait dengan Provinsi Jambi;

4. RUU penyesuaian terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
5. RUU penyesuaian terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

➤ **Daftar Kegiatan Diplomasi Parlemen :**

1. Pertemuan *GOPAC Executive Committee* di Doha, Qatar pada 25-26 Mei 2022, yang akan membahas rancangan kerja GOPAC ke depan dan diharapkan dapat menjadi pendorong atas komitmen Indonesia dalam mempromosikan pentingnya peran parlemen guna memberantas korupsi secara global;
2. Sidang *the 13th AIPA Caucus* akan diselenggarakan pada 7 Juni 2022 sebagai upaya memperkuat kerja sama parlemen se-Asia Tenggara;

3. Pertemuan ke-4 *Asia-Europe Political Forum (AEPF)* di Praha, Republik Ceko pada 10-12 Juni 2022. Sidang ini diselenggarakan oleh ICAPP (*International Conference of Asian Political Parties*), di mana partai-partai politik berada di bawah suatu peran yang sama sehingga dapat bertukar pengalaman serta memberikan pandangannya untuk kebutuhan parlemen pada masa mendatang;
4. Sidang *the Eight IPU Global Conference of Young Parliamentarians* di Mesir pada 15-26 Juni 2022 dengan tema "*Young MPs for Climate Action*". Keberadaan delegasi muda ini diharapkan memberi semangat akan banyaknya tujuan yang ingin dicapai sehingga optimisme rakyat Indonesia juga akan semakin tumbuh;
5. Sidang *Parliamentary Forum at the UN High-Level Political Forum on Sustainable*

Development di New York pada 10-14 Juli 2022.
Agenda sidang ini sejalan dengan penyelenggaraan *SDGs Day* ke berbagai daerah yang terus diupayakan pula pada masa sidang ini